

Islam, Demokrasi, dan Politik Pasca-Pemilu 2019

Oleh
Syamsuddin Haris

Islam dan Demokrasi (1)

- Sulit dibantah, meskipun banyak kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto yang cenderung prosedural dan mengalami stagnasi (Marcus Mietzner, 2012; Olle Tornquist, 2017) dan bahkan defisit, Indonesia adalah satu dari sedikit contoh demokrasi pascaotoriter yang relatif stabil selama dua dekade. Oleh karena itu terlepas berbagai kekurangannya, termasuk duka kita yang mendalam atas meninggalnya ratusan anggota KPPS yang berjasa mensukseskan Pemilu 2019, prosesnya yang aman dan damai, saya kira patut diapresiasi;
- Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit contoh yang menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya *compatible* dengan sistem demokrasi. Realitas ini membantah tesis sejumlah ahli, di antaranya Samuel P. Huntington, bahwa seolah-olah Islam tidak *compatible* dengan demokrasi. Islam yang mana yang dianggap *compatible* dengan demokrasi? Pengalaman Indonesia sekurang-kurangnya selama dua dekade terakhir (1999-2019) memberi jawaban yang cukup jelas bahwa hanya Islam moderat (*wasathiyah*) yang basis kulturalnya sudah berurat-berakar terutama di lingkungan Muhammadiyah dan NU tampaknya yang *compatible* dengan system demokrasi. Dua ormas terbesar ini bahkan telah mengawal demokrasi kita sejak Republik Indonesia berdiri pada 1945.

Islam dan Demokrasi (2)

- Karena itu dalam rangka memperluas dan memperkuat demokrasi kita maka tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dan NU ke depan adalah bagaimana semakin memperluas basis dan jaringan Islam *wasathiyah*. Sebaliknya, jika Muhammadiyah dan NU sebagai basis Islam *wasathiyah* digerogeti, saya kira yang terancam bukan hanya demokrasi, tetapi juga kelangsungan Indonesia kita yang berfondasikan keberagaman sebagaimana terkristalisasi di dalam Pancasila.
- Dalam kaitan ini sudah waktunya dua ormas Islam terbesar yang menjadi basis Islam *wasathiyah*, Muhammadiyah dan NU, meninggalkan “zona nyaman” mereka dalam memberikan kontribusi tak berkesudahan bagi Indonesia yang bersatu di dalam keberagaman. Muhammadiyah dan NU tidak bisa lagi bersikap pasif dan reaktif ketika gerakan-gerakan, meminjam istilah Abdul Mu’ti, *emerging Islam*, mengganggu kenyamanan kalangan mayoritas *established Islam* melalui berbagai manuver politik yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa kita.

Islam dan Demokrasi (3)

- Namun demikian yang menarik partai Islam tidak pernah memenangkan pemilu di negeri ini sejak 1955 hingga 2019. Mengutip Prof. Deliar Noer, meskipun secara sosiologis Islam mayoritas, tetapi secara politik tetap minoritas. Total perolehan tertinggi yang pernah dicapai oleh partai Islam dalam pemilu adalah sekitar 43,9 persen (1955). Dalam pemilu era reformasi, total perolehan partai Islam tidak kunjung lebih baik kendati secara elektoral relatif stabil, yakni 37,4 persen (1999), 38,5 persen (2004), merosot drastis menjadi 25,9 persen (2009) dan 31,4 persen (2014). Hasil sementara Pemilu 2019 (Situng KPU, 8 Mei 2019), total perolehan partai Islam merosot lagi menjadi sekitar 27,98 persen.
- Ada banyak faktor di balik kegagalan partai2 Islam, di antaranya: (1) faktor organisasi dan kelembagaan partai; (2) faktor polarisasi politik dan kepemimpinan; (3) faktor identitas dan disorientasi ideologis sehingga partai-partai Islam kehilangan isu yang relevan dan “menjual”; (4) faktor kinerja elektoral partai yang tidak optimal; (5) faktor transformasi sosio-kultural yang dialami pemilih sehingga mengubah orientasi politik konstituen yang mayoritas Muslim; (6) faktor internalisasi nilai-nilai dan simbol Islam di kalangan partai-partai nasionalis; dan (7) faktor struktur politik yang berlaku, termasuk sistem pemilu dan sistem kepartaian (Haris, 2004; juga Haris, 2016).

Pemilu dan Problem Demokrasi Kita (1)

- Sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998 relatif tidak ada konsolidasi sipil, padahal konsolidasi sipil merupakan prasyarat bagi demokrasi yang terkonsolidasi. Elite politik berbasis massa luas cenderung melembagakan saling curiga di antara mereka, sehingga pertemuan Ciganjur yang menghasilkan “Deklarasi Ciganjur” (1998), bukanlah inisiatif Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sri Sultan HB X, melainkan atas prakarsa para aktivis mahasiswa Jakarta dan Bandung. Situasi tersebut tak hanya berdampak pada tidak adanya konsensus minimum di antara para pemimpin sipil berbasis massa luas untuk merumuskan arah demokrasi kita pasca-Soeharto, melainkan juga melembaganya saling curiga seperti diwariskan oleh rejim otoriter Orde Baru. Ke mana arah demokrasi dan pemerintahan pasca-Soeharto tidak begitu jelas.
- Pembangunan lembaga-lembaga demokrasi tidak disertai pembangunan karakter, watak, dan kultur berdemokrasi, sehingga demokrasi akhirnya dibajak oleh para elite politik oligarkis yang menguasai sumberdaya ekonomi dan sumberdaya politik. Kedaulatan rakyat akhirnya tak lebih dari prosesi politik prosedural-elektoral.
- Institusionalisasi demokrasi pun cenderung berlangsung secara tambal sulam. Hal ini tidak hanya tampak dari konstitusi kita produk empat tahap amandemen, tetapi juga terlihat dari UU bidang politik yang tidak koheren dan tidak konsisten satu sama lain.

Pemilu dan Problem Demokrasi Kita (2)

- Ketiadaan agenda dan *platform* politik yang jelas serta absennya konsensus minimum ini menjelaskan mengapa kubu oposisi terpecah ke dalam tiga kelompok, yakni (1) kekuatan-kekuatan *status quo* yang berpusat di tubuh militer, Golkar, dan kroni Soeharto; (2) kelompok reformis moderat yang didominasi para pemimpin partai-partai baru; dan (3) kelompok reformis radikal yang berpusat pada sebagian kelompok gerakan mahasiswa dan LSM. Realitas polarisasi ini pula tampaknya turut mempengaruhi perkembangan institusionalisasi demokrasi yang cenderung tambal-sulam setelah Pemilu 1999.
- Meskipun reformasi konstitusi telah dilakukan, namun sulit dibantah bahwa dalam realitasnya perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 tersebut cenderung bersifat tambal sulam. Dalam konteks substansi hasil amandemen, di satu pihak hendak dibangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat, stabil, dan efektif, namun di sisi lain obsesi besar tersebut tidak didukung oleh struktur perwakilan *bicameral* yang kuat pula. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semestinya merupakan salah satu “kamar” dari sistem perwakilan dua-kamar, bahkan tak jelas karena kekuasaan dan hak-haknya yang sangat terbatas. Sebaliknya, para politisi parpol selaku penyusun konstitusi justru makin memperkuat posisi, kedudukan, kekuasaan, dan hak-hak DPR.

Pemilu dan Problem Demokrasi Kita (3)

- Substansi hasil amandemen yang juga tidak koheren dan inkonsisten dengan kebutuhan pembentukan sistem presidensial yang kuat dan efektif adalah kedudukan dan kelembagaan MPR. Institusi MPR yang semestinya merupakan sidang gabungan (*joint session*) antara DPR dan DPD justru menjadi lembaga permanen dengan kepemimpinan permanen pula. Demokratisasi pasca-Orde Baru telah meningkat secara signifikan, ditandai antara lain reformasi konstitusi, pemilu yang demokratis, dan bahkan pemilihan langsung bagi presiden dan kepala-kepala daerah.
- Bersamaan dengan itu pemahaman terhadap politik, partai politik, pemilu, demokrasi, dan esensi pemerintahan itu sendiri mengalami pendangkalan yang luar biasa selama satu dekade terakhir. Sebagian sumber pendangkalan pemahaman politik itu adalah berbagai distorsi yang diwariskan rejim otoriter Orde Baru, namun sebagian lainnya adalah produk dari transisi demokrasi yang berlangsung tanpa komitmen etis yang jelas dan terarah bagi bangsa ini ke depan.

Pemilu dan Problem Demokrasi Kita (4)

- Pendangkalan pemahaman terhadap politik tersebut berdampak pada terjadinya krisis etika dan kepemimpinan sangat serius di semua tingkat, negara dan masyarakat, di pusat dan daerah. Lembaga-lembaga parlemen di tingkat nasional dan daerah yang semestinya menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat justru berkembang menjadi kelompok-kelompok penekan yang tak jarang memaksakan kehendaknya atas nama rakyat atau atas nama demokrasi itu. Korupsi pejabat publik merajalela, begitu pula jual beli jabatan, dan politik transaksional lainnya. Ironisnya, semua ini tidak hanya terjadi di tingkat negara, tetapi juga masyarakat.
- Kegagalan kepemimpinan juga dapat dilihat dalam *performance* partai-partai politik. Hal itu antara lain tercermin dari kecenderungan para elite partai meraih dukungan dengan memanipulasi identitas kultural dan primordial. Hampir belum pernah ada upaya para pemimpin partai untuk mendidik rakyat supaya mendukung mereka secara rasional berdasarkan prinsip pertukaran dukungan (yang diberikan rakyat) dengan pelayanan publik (yang diberikan elite sebagai kompensasinya). Di sisi lain sebagian partai-partai terperangkap ke dalam kepemimpinan yang cenderung oligarkis, sehingga komitmen terhadap segenap proses demokratis acapkali berhenti sebagai jargon yang bahkan tidak terwujud dalam kehidupan internal partai.

Dampak Problem Demokrasi Kita

- Pemilu, pilpres, dan pilkada berhasil, tetapi sekadar prosedural, bukan substansi, sehingga menghasilkan demokrasi elektoral yang prosedural, padahal kita membutuhkan demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Pemilu, pilpres, dan pilkada cenderung menghasilkan penguasa2 ketimbang para pemimpin dgn tanggung jawab kepemimpinan yang melekat pada dirinya;
- Pemilu serentak 2019 tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena tidak didesain untuk menjawab kebutuhan bangsa akan penguatan sistem presidensial, sehingga tidak ada insentif politik di balik skema pemilu serentak versi MK. Kecuali keserentakannya, tidak ada dampak pemilu serentak bagi perbaikan kualitas kehidupan demokrasi dan pemerintahan hasil pemilu.
- Berlangsungnya korupsi masif di tingkat elite politik, baik para elite penyelenggara negara di lembaga eksekutif maupun lembaga legislative, di pusat dan daerah. Belakangan, korupsi masif juga melanda lembaga yudikatif, mulai hakim, jaksa, polisi, panitera pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya;

Politik Pasca-Pemilu 2019 (1)

- Tantangan terbesar pertama yang dihadapi presiden terpilih adalah keniscayaan untuk melakukan rekonsiliasi nasional sebagai prasyarat bagi keberlanjutan dan kelangsungan pembangunan pascapemilu. Dalam hubungan ini perlu rekonsiliasi kehidupan bangsa kita, tidak hanya terkait dengan keterbelahan pilihan politik menjelang dan pasca pemilu, melainkan juga menyangkut hubungan antaragama, interen umat beragama, relasi antaretnis, antardaerah, dan antargolongan.
- Itu artinya yang diperlukan bukan hanya rekonsiliasi politik pada tingkat negara atau *political society*, melainkan juga rekonsiliasi kebangsaan pada tingkat *civil society*. Rekonsiliasi politik mengandung arti menyamakan kembali persepsi di antara berbagai pemangku kepentingan tentang tujuan bernegara. Sedangkan rekonsiliasi kebaangsaan mengandung arti perlunya merekat dan merajut kembali relasi antaretnis, agama, daerah, dan antargolongan dalam semangat bhineka tunggal ika.
- Menata masa depan bangsa menjadi lebih beradab, berdaulat dan bermartabat tidak mungkin dilakukan tanpa berdamai dengan masa lalu. Itu artinya beban masa lalu harus diselesaikan bersama.

Politik Pasca-Pemilu 2019 (2)

- Rekonsiliasi politik pada tingkat negara meniscayakan kemauan politik para pimpinan lembaga negara dan parpol untuk saling bertemu dalam rangka membangun kesepahaman mengenai masalah strategis bangsa hari ini dan ke depan. Dalam konteks pemilu yang sudah berlangsung, para elite politik perlu menyepakati misalnya pentingnya kepercayaan kolektif terhadap jajaran penyelenggara pemilu sehingga proses dan hasilnya memiliki legitimasi politik yang tinggi. Inisiatif rekonsiliasi politik perlu datang dari Presiden.
- Rekonsiliasi kebangsaan pada tingkat masyarakat meniscayakan kesediaan para pemimpin masyarakat dan organisasi kemasyarakatan utk menyamakan persepsi tentang problem bangsa kita hari ini dan ke depan. Muhammadiyah dan NU dapat mengambil inisiatif untuk rekonsiliasi kebangsaan ini dengan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk lebih mengedepankan kepentingan kolektif bangsa kita ketimbang kepentingan politik dan elektoral yang bersifat jangka pendek. Dalam konteks pascapemilu, rekonsiliasi kebangsaan hendaknya berorientasi kepada kesadaran mengenai dampak negatif pembelahan dan polarisasi politik elektoral bagi keutuhan bangsa dan keindonesiaan kita.

Politik Pasca-Pemilu 2019 (3)

- Tantangan besar lain yang perlu dilakukan presiden terpilih adalah memulihkan kepercayaan sekaligus meyakinkan umat bahwa siapapun yang terpilih pada akhirnya itulah pilihan umat Islam Indonesia. Jika misalnya Jokowi yang memenangkan pemilu, pada dasarnya itulah pilihan umat Islam karena mayoritas yang mencoblos Jokowi-Amin adalah kaum muslimin.
- Tantangan berikut bagi presiden terpilih adalah memenuhi aspirasi publik tentang pemerintahan yang bersih dan benar² bekerja untuk rakyat. Itu artinya, perlu kabinet profesional yang ramping tetapi efektif. Ini tidak mudah karena Jokowi memenangi pemilu bukan semata-mata karena keringat sendiri, tetapi keringat bersama parpol koalisi, tim sukses (TKN), dan ribuan relawan. Itu artinya, selain dituntut untuk memenuhi ekspektasi publik, Jokowi juga akan dihadapkan pada keharusan membalas budi parpol koalisi pendukung, tim sukses (TKN), dan relawan yang merasa "berjasa" memenangkan Jokowi. Jika kecenderungan kedua mengalahkan yang pertama maka kabinet kerja Jokowi tidak akan lebih baik dari sebelumnya, dalam arti sangat mungkin lebih transaksional ketimbang kabinet kerja yang pertama.

Mengapa Harus Rekonsiliasi?

- Meskipun kita sepakat bahwa fondasi kebangsaan dan keindonesiaan adalah keberagaman itu sendiri, namun sulit dibantah, pemerintah-pemerintah sejak Indonesia merdeka tidak pernah secara serius dan cerdas mengelola keberagaman, sehingga cenderung berhenti sebagai pidato dalam upacara-upacara resmi negara di semua tingkat. Selama lebih dari 70 tahun merdeka tidak pernah ada upaya serius bagaimana keberagaman secara agama, ras, etnik dan daerah dikonversi, dikelola, dan dikapitalisasi sebagai aset dalam mewujudkan Indonesia yang kokoh, adil, makmur, dan sejahtera.
- Jadi kecurigaan kultural dan bersifat sektarian semakin melembaga ketika berbagai kebijakan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya tidak berpihak kepada upaya memperkuat keberagaman sebagai fondasi keindonesiaan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan antidemokrasi untuk melembagakan saling curiga di antara berbagai elemen dan golongan masyarakat yang sudah berlangsung sejak militer masuk politik menjelang akhir 1950-an. Keterbelahan politik jelang dan pasca-Pemilu 2019 pada dasarnya produk dan kelanjutan belaka dari politik otoriter yang sudah bersemi sejak militer masuk ke politik.

*Wassalam,
Terima kasih*